



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 disusun berpedoman pada Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Pagu Indikatif dan sumbernya serta prakiraan maju Tahun 2026 berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025. Disamping menyajikan data perencanaan, Renja Tahun 2025 juga menyajikan kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Tarutung,

2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. TONNY LISTON SIMANGUNSONG, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196506131993031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Pengertian Renja	2
1.1.2. Proses Penyusunan Renja	3
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	20
BAB III PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- i. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang menguraikan visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- ii. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/Perangkat Daerah kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- iii. Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Dokumen Renja 2025.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

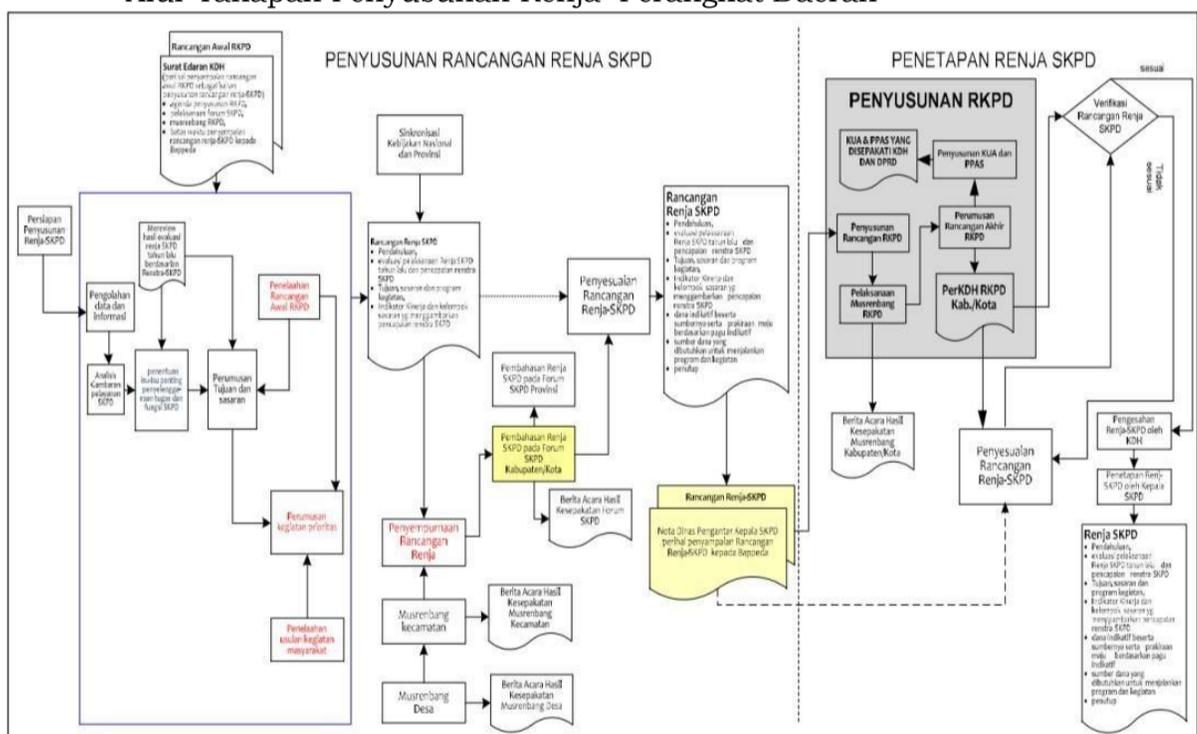
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan Renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2025 yang memuat arah kebijakan Pemerintah dalam satu tahun. Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

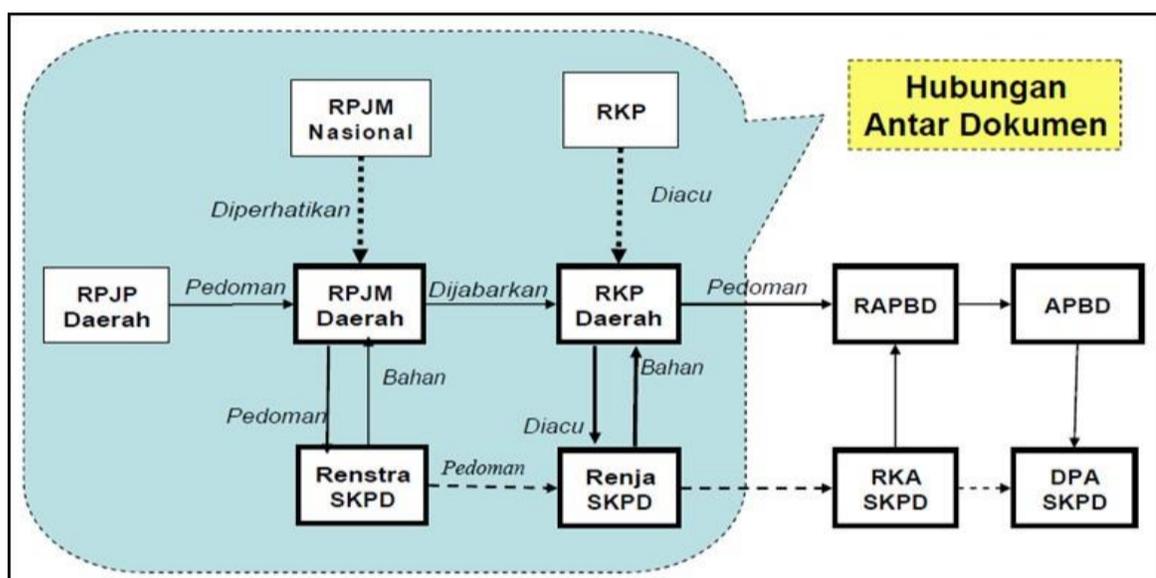
Gambar 1.1.2.1

Alur Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.3.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Keqa Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021;
- 8) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat yang beragama, beradab, berakhlak dan makmur dalam kurun waktu satu tahun dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 3 (tiga) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja yang dievaluasi dan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%). Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja yang dievaluasi dilihat dari realisasi kinerja pada Tahun 2024. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%) dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dan anggaran dengan target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2025 yang dievaluasi dalam satuan persentase atau dengan notasi (tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi = realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja yang dievaluasi/target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2025 yang dievaluasi) x 100.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi :
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 target kinerjanya tercapai 100 % dan dilaksanakan hampir sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Tahun 2024, target kinerjanya tercapai sebanyak 100 %, karena merupakan salah satu indikator utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Program Penguatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik pada Tahun 2024, target kinerjanya hanya mencapai 100 %.

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sampai pada Tahun 2024 mencapai target realisasi 100 %.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

- Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial pada Tahun 2024 mencapai realisasi 100 %.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persen (%)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.851.226.946	2.764.194.464	96,95	APBD
1.1.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	30.920.000	30.906.000	99,95	
1.1.1	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.540.000	2.540.000	100	
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.540.000	2.540.000	100	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	100	
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.840.000	21.826.000	99,94	
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.530.103.382	2.457.859.195	97,14	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.400.182	2.402.155.995	97,08	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	51.703.200	51.703.200	100	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	100	
1.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	148.549.000	148.045.663	99,66	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.768.900	3.768.900	100	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.246.600	24.762.850	98,08	
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	5.120.000	5.120.000	100	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.968.500	5.968.500	100	

1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.445.000	108.425.813	98,81	
1.4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	15.787.200	15.600.000	98,81	
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.787.200	15.600.000	98,81	
1.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	96.094.364	83.884.371	87,29	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.489.600	27.351.787	69,26	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.604.764	54.532.584	99,87	
1.6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	29.773.000	27.899.235	93,71	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.769.000	17.924.535	90,67	
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.033.700	5.029.900	99,92	
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.970.300	4.944.800	99,06	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	466.865.600	440.201.500	94,29	APBD
2.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Karakter Kebangsaan</i>	466.865.600	440.201.500	94,29	
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300.000.000	297.431.900	99,14	
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	166.865.600	142.769.600	85,56	

3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	55.369.658.069	55.369.658.067	100	APBD
3.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan</i>	55.369.658.069	55.369.658.067	100	
3.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	55.369.658.069	55.369.658.067	100	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	33.135.000	32.995.000	99,58	APBD
4.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	33.135.000	32.995.000	99,58	
4.1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	33.135.000	32.995.000	99,58	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	304.000.000	300.808.800	98,95	APBD
5.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	304.000.000	300.808.800	98,6	

5.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	36.300.000	35.360.000	97,41	
5.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	63.700.000	63.448.800	99,61	
5.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	204.000.000	202.000.000	99,02	
	Total Anggaran 2024	59.024.885.615	58.907.857.831	99,80	APBD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara yang telah tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data – data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sesuai DPA 2024	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Renja 2025	
							Kinerja	Anggaran
1					2	3	4	5
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	6.000.000
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 kegiatan	4.500.000
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	29.993.000

8	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		
8	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2.595.648.826
8	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 bulan	50.461.200
8	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 kegiatan	4.500.000
8	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		
8	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya biaya untuk Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	7.000.000
8	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	19.999.000
8	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	7.000.000
8	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya biaya cetakan dan penggandaan	12 bulan	10.163.200
8	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	123.445.000

8	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		
8	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	12.608.500
8	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		
8	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	1.000.000
8	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	27.630.000
8	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	54.595.500
8	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		
8	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	19.995.900
8	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	7.401.900
8	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	6.998.400

8	01	02				PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
8	01	02	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
8	01	02	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 %	100.000.000
8	01	02	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	300.000.000
8	01	02	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	166.865.600

8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatkan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan fasilitasi Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah		
8	01	02	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya penyusunan perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	958.969.080

8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatkan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan fasilitasi Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Ormas LSM		
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	49.973.000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	32.530.000

8	01	06	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Terlaksananya pelaksanaan monitoring Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	42.470.000
8	01	06	2.01	06		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	100%	276.000.000

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 yang memuat rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyatakan Rencana Kerja Perubahan PD merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berikutnya.

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi PD dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat daerah dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD).

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara dapat tercapai.

Tarutung, Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. TONNY LISTON SIMANGUNSONG, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196506131993031002